



Judul : DPR Bahas RUU Jabatan Hakim
Tanggal : Selasa, 14 Juni 2016
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 6

DPR Bahas RUU Jabatan Hakim

Sikapi Hakim MA yang Tertangkap KPK

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum pejabat Mahkamah Agung (MA) atas dugaan jual beli perkara. KPK juga melakukan tangkap tangan salah satu oknum Ketua Pengadilan Negeri, hakim dan panitera di Bengkulu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa mengatakan, mengapresiasi pada KPK yang dengan gencar-gencarnya melakukan penangkapan di lingkungan lembaga peradilan itu.

Desmond juga menilai dengan adanya peristiwa seperti ini, fenomena pencari keadilan pada hari ini sangat lah sulit untuk masyarakat kecil dan hanya menguntungkan bagi masyarakat yang hanya punya duit.

"Apa yang dipertontonkan peradilan dengan sering ditangkapihnya hakim-hakim itu bahwa kepastian hukum di MA itu tidak ada yang terjadi transaksi-transaksi keadilan, yang sekarang ini

secara vulgar itu lah yang dipertontonkan oleh peradilan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6).

Politisi Gerindra ini khawatir jika lembaga peradilan bisa diperjual belikan, maka hukum di Indonesia bisa dikatakan hanya menguntungkan bagi orang-orang yang berduit. "Kalau ini peradilan tidak diperbaiki oleh pimpinan MA ini lah persoalan-persoalan yang hari ini terjadi. Masyarakat sudah susah, mencari keadilan itu berpihak pada orang yang punya duit. Apa yang akan terjadi di negara ini?" ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, kata Desmond, DPR sedang membahas Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang kini pembahasannya tengah bergulir di DPR. Ada sejumlah poin penting yang menurut Desmond perlu ditekankan dalam RUU JH tersebut, salah satunya tentang perlunya kewenangan eksekutorial bagi Komisi Yudisial. Alasannya, selama ini putusan KY hanya bersifat rekomendasi usul penjatuhan sanksi. **(dil)**